

# Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal

<sup>1</sup>Rizqi Rahmawati, <sup>2</sup>Tutik Heriana, <sup>3</sup>Mila Diana Sari, <sup>4</sup>Susantriana Dewi, <sup>5</sup>Nauva Almas

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Merdeka Malang, Indonesia

<sup>1</sup>[rizqi.rahmawati@unmer.ac.id](mailto:rizqi.rahmawati@unmer.ac.id), <sup>2</sup>[tutik.heriana@unmer.ac.id](mailto:tutik.heriana@unmer.ac.id), <sup>3</sup>[mila.sari@unmer.ac.id](mailto:mila.sari@unmer.ac.id)

<sup>4</sup>[susantriana.dewi@unmer.ac.id](mailto:susantriana.dewi@unmer.ac.id), <sup>5</sup>[novanauva01@gmail.com](mailto:novanauva01@gmail.com)

## ABSTRAK

Peran penting Undang-Undang Desa (UU Desa) dalam pembangunan desa di Indonesia telah sesuai dengan tujuan, dan menempatkan desa sebagai subyek pembangunan. Misalnya melalui pembangunan ekonomi lokal seperti membangun BUMDes, pembangunan desa wisata sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat desa. Permasalahan yang muncul adalah dengan besarnya dana desa yang diperuntukan setiap desa di seluruh Indonesia, menyebabkan dana desa menjadi sorotan dan pantauan banyak pihak terkait kelemahan potensi penyalahgunaan dalam pengelolaannya. Berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan, penelitian ini dirancang untuk lebih mendalam menginvestigasi dampak dari akuntabilitas dan kompetensi aparat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Selain dari masyarakat terdapat juga Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dibentuk untuk melakukan pengawasan keuangan desa. Dalam analisis data dan pengujian dalam penelitian ini, digunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS). Model PLS mendefinisikan variabel laten sebagai gabungan linier dari indikator. Model luar (outer model) dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan bantuan perangkat lunak Smart-PLS 3.0. Berdasarkan penelitian menyatakan hubungan bahwa kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki hasil positif namun tidak signifikan, dan hasil positif dan signifikan merupakan hasil pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa. Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci :** Akuntabilitas, Dana Desa, Kompetensi, Teknologi Informasi, SPI

## PENDAHULUAN

Peran penting Undang-Undang Desa (UU Desa) dalam pembangunan desa di Indonesia telah sesuai dengan tujuan, dan menempatkan desa sebagai subyek pembangunan. UU Desa bertujuan meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa, mempercepat perbaikan kondisi sosial masyarakat desa, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, mengatur penggunaan sumber daya secara efektif, dan meningkatkan kemampuan bersaing (Ismail et al., 2023). Salah satu peran penting UU Desa adalah memberikan wewenang kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintahan desa memiliki dampak terhadap keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Latif et al., 2019). Pemberian wewenang dan tanggung jawab dari UU Desa kepada pemerintahan desa bertujuan untuk memungkinkan mereka mengelola anggaran dengan efektif. Hal ini diharapkan dapat mempercepat



proses pembangunan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang ada di desa. Kepala desa memiliki tanggung jawab dalam menggerakkan, mengarahkan, dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan (Sukmana & Islamy, 2019). Contohnya melalui pembangunan ekonomi lokal seperti membangun BUMDes, pembangunan desa wisata sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat desa (Septiansyah & Kushartono, 2022). Pembangunan ekonomi desa yang sejahtera dan mandiri juga dibutuhkan peran kepala desa yang memiliki jiwa kepemimpinan, selalu berinovasi dan mempunyai jiwa kewirausahaan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan hal penting dalam pembangunan desa. Good Corporate governance (GCG) memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan kebijakan serta penunjang pembangunan desa terhadap kemashlahatan dan kesejahteraan masyarakat desa (Ananda, 2021). Konsep transparansi keterlibatan yang akuntabel dan keadilan (Thoyib et al., 2020) kemandirian dan bertanggung jawab harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana desa (Soleh et al., 2017).

Pengelolaan keuangan dana desa dikatakan akuntabel ketika telah mengikuti proses pengelolaan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pelaporan keuangan dana desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan hal yang penting untuk memastikan transparansi, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan desa. Akuntabilitas merupakan sebuah mekanisme pertanggungjawaban (Aucoin & Heintzman, 2000). Lebih dari itu, akuntabilitas juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mempertanggungjawabkan kinerja pejabat publik melalui tindakan yang sesuai dengan standar etika (Munidewi, 2017). Pernyataan ini selaras dengan penelitian dari (Avellyni & Handayani, 2021) yang mengindikasikan bahwa akuntabilitas memiliki dampak terhadap efektivitas dalam mengelola dana desa.

Ketika berbicara tentang pengaturan dana di tingkat desa, pentingnya keterbukaan dalam penggunaan dan kesinambungan alokasi dana tidak dapat diabaikan. Sistem pengendalian internal (SPI) memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi sejauh mana tanggung jawab akuntabilitas dalam mengelola dana desa dapat diwujudkan (Arfiansyah & Astuti, 2020).

Di Tahun 2018, pemerintah pusat menetapkan anggaran sebesar Rp60 triliun, capaian penyaluran dana desa mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Sebagai bagian dari pengawasan dana desa, untuk mewujudkan pengelolaan yang akuntabel diperlukan mekanisme pengawasan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pengawasan masyarakat desa akan sangat efektif apabila pengelolaan dana desa terutama dalam pelaksanaan kegiatan selalu melibatkan partisipasi langsung masyarakat desa.

Dengan banyaknya jumlah dana desa yang disalurkan ke setiap desa di seluruh Indonesia, membuat dana desa menjadi perhatian banyak pihak dan dicermati potensi kelemahan dalam pengelolaannya. Selain dampak negatif yang ditimbulkan dari alokasi dana desa, kita juga harus menghargai efektivitas penggunaan dana desa. Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahunan terhadap pelaksanaan dana desa telah tercipta sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat. (Sumarto, 2023)

Berdasarkan konteks fenomena yang telah diuraikan, penelitian ini dirancang untuk lebih mendalam menginvestigasi dampak dari akuntabilitas dan kompetensi aparat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Penelitian empiris ini akan dilakukan di berbagai desa yang terletak di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Stewardship

Implementasi Teori stewardship dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan beberapa langkah dan strategi. Menurut (Donaldson & Davis, 1991) pentingnya membangun pengawasan yang efektif. Sistem pengawasan yang baik akan memastikan bahwa pengelola dana desa bertanggung jawab dan akuntabel dalam penggunaan dana desa. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim pengawas yang terdiri dari masyarakat desa dan memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. Selain dari masyarakat terdapat juga Satuan Pengawas Internal (SPI) yang

dibentuk untuk melakukan pengawasan keuangan desa. Tim pengawas dan SPI dapat melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan pengaturan dan kepentingan masyarakat (Rusydi, 2020).

Menjalin komunikasi yang transparan antara para pengelola dana desa dan masyarakat menjadi langkah yang sangat penting. Dalam konteks ini, penting bagi pengelola dana desa untuk secara terbuka menyampaikan informasi tentang penggunaan dana desa kepada masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyusunan laporan keuangan dana desa. Dengan menerapkan teknologi informasi, laporan keuangan dana desa dapat disusun secara terperinci dan dapat dimengerti dengan mudah oleh masyarakat (Indraswari & Rahayu, 2021)

### **Kompetensi Aparatur Desa**

Dalam mengelola dana desa, kapabilitas perangkat desa menjadi elemen krusial untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan akuntabel. Kemampuan aparatur desa meliputi faktor-faktor seperti riwayat pendidikan, pengetahuan dalam bidang akuntansi, pengalaman, serta keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan dana desa (Juniarti & Inapty, 2022). Kompetensi aparatur memadai dibutuhkan dalam mendukung penggunaan teknologi informasi sehingga dapat berpengaruh dalam efektivitas pengelolaan dana desa (Purba et al., 2022). Indikator-indikator dalam pengelolaan akuntabilitas pengelolaan desa adalah Pengetahuan (Knowledge), Keahlian (Skills), dan Kemampuan (abilities) (Mada et al., 2017). Dengan memiliki kemampuan yang memadai, aparat desa dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif, termasuk dalam pengelolaan dana desa.

H1: Kompetensi aparatur memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

H6: Kompetensi aparatur memengaruhi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui pengaruhnya pada Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Penggunaan teknologi informasi dalam akuntabilitas pemerintahan desa memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan dana desa. Penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi diidentifikasi sebagai salah satu komponen dari sistem keuangan desa yang dapat meningkatkan akuntabilitas (Arfiansyah & Astuti, 2020). Penggunaan sistem informasi dalam akuntansi pada pemerintahan desa dapat membantu proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan desa. Dengan adanya sistem akuntansi berbasis teknologi informasi, data keuangan dapat diolah secara otomatis dan akurat, mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pencatatan dan pelaporan (Ismail et al., 2016).

Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah telah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes). Dalam aplikasi ini, transaksi input diproses sehingga menghasilkan output sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, seperti laporan realisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), serta laporan-laporan lainnya yang diperlukan. (Arfiansyah & Astuti, 2020).

H2: Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

H7: Pemanfaatan teknologi informasi memengaruhi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui pengaruhnya pada Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

### **Sistem pengendalian intern (SPI)**

SPI berperan dalam meningkatkan kinerja, transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara (Prabawa et al., 2020). Satuan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan satuan intern yang telah disahkan oleh UU dan memiliki tugas dalam pengawasan keuangan negara. Proses pengawasan menjadi bagian yang sangat penting dalam

memastikan keseluruhan tahapan pelaksanaan dan pelaporan APBD berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang ditetapkan (Budiati et al., 2020). Indikator-indikator untuk pengendalian internal mencakup aspek lingkungan pengendalian, evaluasi risiko, upaya pengendalian, penyediaan informasi, komunikasi, serta pemantauan atas pengendalian internal.

H3: Kompetensi aparatur berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI)

H4: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa merupakan aspek yang krusial dalam pembangunan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, akuntabilitas memegang peranan penting sebagai landasan untuk memastikan pengelolaan dana desa dilakukan dengan transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan (Avellyni & Handayani, 2021) Dalam literatur terkait, konsep akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sering dikaitkan dengan transparansi dalam pelaporan, pertanggungjawaban, dan penggunaan dana yang sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

Akar konsep akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat ditelusuri ke regulasi-regulasi pemerintahan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2020 yang mengatur tata kelola keuangan desa. Regulasi ini mewajibkan pemerintahan desa untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana melalui transparansi dalam pelaporan keuangan, pertanggungjawaban atas penggunaan dana, serta pengawasan yang memadai. Proses pengelolaan keuangan desa diemban oleh kepala desa dan dibantu oleh tim pelaksana.

H5: Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan kuantitatif dan termasuk dalam kategori penelitian formal, di mana dimulai dengan membentuk hipotesis atau pertanyaan penelitian. Selanjutnya, penelitian ini melibatkan langkah-langkah dan spesifikasi yang tepat dalam mengumpulkan sumber data yang relevan, dengan tujuan untuk menguji validitas hipotesis yang diajukan atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

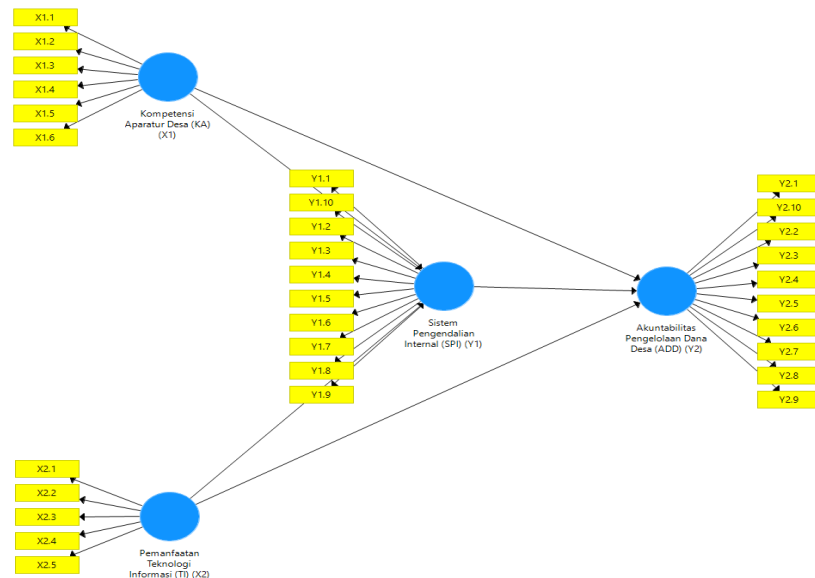
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui respons responden yang mengisi kuesioner, yang telah diuji mengenai validitas dan reliabilitasnya. Populasi dalam penelitian ini melibatkan seluruh staf desa yang terlibat dalam proses pengelolaan dana desa. Pelaksanaan pengelolaan dana desa ditangani oleh kepala desa dan tim Pelaksana yaitu sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Kabupaten Ponorogo memiliki 307 desa/kelurahan, dan setiap desa melibatkan 4 staf dalam pengelolaan, sehingga total populasi adalah 1228 staf. Dalam penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Perhitungan menunjukkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 92 staf perangkat desa di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Dalam analisis data dan pengujian dalam penelitian ini, digunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS). Model PLS mendefinisikan variabel laten sebagai gabungan linier dari indikator. Model luar (outer model) dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan bantuan perangkat lunak Smart-PLS 3.0. Model ini menganalisis hubungan antara variabel melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan. Terdapat tiga kriteria pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi validitas dan keandalan model luar, yakni konvergensi (convergent validity), diskriminan (discriminant validity), dan reliabilitas

komposit (composite reliability). Setelah pengukuran ketiga kriteria kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh antar variabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data dari kuesioner memanfaatkan aplikasi SmartPLS versi 3.0. Pada gambar 1 mengilustrasikan model awal yang menggambarkan hubungan antara berbagai variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini.. Model awal ini disusun dengan merujuk pada kerangka konseptual dan menggunakan indikator yang terdapat dalam setiap pertanyaan dalam angket penelitian



Gambar 1. Model Awal Penelitian

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 92 staf perangkat desa yang berada di wilayah Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Data menunjukkan mayoritas responden penelitian ini adalah pria, dan sebagian besar dari mereka berada dalam kelompok usia 35-45 tahun. berdasarkan data tingkat pendidikan, dapat diidentifikasi bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan SMA/SLTA. Hal Ini mencerminkan fakta bahwa mayoritas pemerintah desa di Kecamatan Jenangan memiliki tingkat pendidikan yang berada pada level menengah. Selanjutnya, mayoritas perangkat desa telah bekerja selama periode 5-10 tahun. Hasil uji validitas ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Uji Validitas Awal

Variabel	Kode	Outer	AVE
Kompetensi Aparatur Desa	X1.1	0.772	0.389
	X1.2	0.806	
	X1.3	<b>0.254</b>	
	X1.4	<b>0.095</b>	
	X1.5	0.706	
	X1.6	0.667	
Pemanfaatan Teknologi Informasi	X2.1	<b>0.051</b>	0.340
	X2.2	0.612	
	X2.3	0.889	
	X2.4	0.790	
	X2.5	<b>0.056</b>	
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Y1.1	0.737	0.366
	Y1.2	0.635	
	Y1.3	0.672	
	Y1.4	<b>0.247</b>	
	Y1.5	0.719	
	Y1.6	0.749	
	Y1.7	<b>0.176</b>	
	Y1.8	0.642	
	Y1.9	<b>0.310</b>	
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Y2.1	0.640	0.390
	Y2.2	<b>0.244</b>	
	Y2.3	0.655	
	Y2.4	<b>0.335</b>	
	Y2.5	0.762	
	Y2.6	0.661	
	Y2.7	0.779	
	Y2.8	0.725	
	Y2.9	<b>0.484</b>	

Hasil uji validitas konvergen pada Tabel 1. menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai loading factor kurang dari 0,6 sehingga indikator tersebut dikeluarkan dari model. Model ini selanjutnya analisis ulang dan diperoleh hasil pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Validitas Akhir

Variabel	Kode	Outer	AVE	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa	X1.1	0.785	0.571	Valid
	X1.2	0.816		
	X1.5	0.706		
	X1.6	0.667		
Pemanfaatan Teknologi Informasi	X2.2	0.692	0.610	Valid
	X2.3	0.888		
	X2.4	0.790		
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Y1.1	0.737	0.516	Valid
	Y1.2	0.635		
	Y1.3	0.768		
	Y1.5	0.759		
	Y1.6	0.750		
	Y1.8	0.642		
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Y2.1	0.640	0.531	Valid
	Y2.3	0.888		
	Y2.5	0.762		
	Y2.6	0.663		
	Y2.7	0.779		
	Y2.8	0.730		

Dalam hal reliabilitas konvergen, Tabel 2 menunjukkan bahwa kuesioner dinyatakan valid karena nilai cross loading pada indikator-indikator lebih besar dari 0,5. Validitas diskriminan diuji dengan menghitung nilai Average Variance Extracted (AVE). Pendekatan ini digunakan untuk menilai

sejauh mana hubungan antara variabel dan indikatornya. Dalam Tabel 2, kolom AVE menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki korelasi yang signifikan dengan indikator-indikatornya.

Tabel 3. Uji Reabilitas

Variabel	Composite Reliability	Keterangan	Syarat
Kompetensi Aparatur Desa	0.882	Reliable	0,70
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.841	Reliable	0,70
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	0.880	Reliable	0,70
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.834	Reliable	0,70

Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas yang mengindikasikan sejauh mana keandalan hasil pengukuran dan konsistensi hasil dalam berbagai pengukuran. Hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan terhadap konstruk yang sebelumnya dinyatakan **valid**.

Tabel 4. R Square

	R Square
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	0.353
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.433

Nilai R<sup>2</sup> pada bagian Sistem pengendalian Internal menunjukkan bahwa sekitar 35% variasi dalam variabel Sistem pengendalian Internal dapat dijelaskan oleh kemampuan Kompetensi aparatur desa dan Pemanfaatan teknologi. Sementara itu, nilai R<sup>2</sup> pada sektor Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa mengindikasikan bahwa sekitar 43% variasi dalam variabel Akuntabilitas Pengelolaan Desa dapat dijelaskan oleh kemampuan Kompetensi aparatur desa dan Pemanfaatan teknologi Informasi.

Tabel 5. Uji Pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung

Hipotesis	Hubungan		Pengaruh langsung		Pengaruh tidak langsung	
			$\beta$	P-value	$\beta$	P-value
<b>H1, H6</b>	KA →	ADD	0.144	0.232	0.196	0.007
<b>H2, H7</b>	TI →	ADD	0.301	0.005	0.085	0.015
<b>H3</b>	SPI →	ADD	0.392	0.001		
<b>H4</b>	KA →	SPI	0.498	0.000		
<b>H5</b>	TI →	SPI	0.218	0.008		

Hasil uji pada hipotesis pertama mengindikasikan bahwa kompetensi aparatur memiliki dampak Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dari pembuktian ini terlihat dari nilai p-nilai sebesar  $0,232 < 0,05$  serta koefisien  $\beta = 0,144$ . Temuan ini tidak mendukung Hipotesis H1, yang menyatakan bahwa Kemampuan aparatur memiliki pengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dengan itu **Hipotesis pertama ditolak**. Selanjutnya hipotesis kedua mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini terlihat dari nilai p-nilai sebesar

0,005<0,05 serta koefisien  $\beta=0,301$ . Temuan ini mendukung Hipotesis H2 yang menyatakan bahwa Kemampuan aparatur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dengan ini **Hipotesis kedua diterima**.

Hasil uji pengaruh langsung pada hipotesis 3 mengindikasikan bahwa Sistem pengendalian Internal memiliki dampak positif terhadap pengelolaan dana desa. Pembuktian ini terlihat dari nilai p-nilai sebesar  $0,001<0,05$  serta koefisien  $\beta=0,392$ . Hasil temuan ini mendukung H3 bahwa Sistem pengendalian Internal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dengan ini **Hipotesis ketiga diterima**. Hipotesis keempat mengindikasikan bahwa kompetensi aparatur memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Sistem pengendalian Internal. Hal ini terlihat dari nilai p-nilai sebesar  $0,000<0,05$  serta koefisien  $\beta=0,498$ . Temuan ini mendukung Hipotesis H4 yang menyatakan bahwa Kemampuan aparatur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Sistem pengendalian Internal, dengan ini **Hipotesis keempat diterima**. Selanjutnya uji pengaruh langsung yaitu hipotesis kelima, mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian Internal. Hasil pembuktian terlihat nilai p-nilai sebesar  $0,008<0,05$  serta koefisien  $\beta=0,218$ , dengan ini **Hipotesis kelima diterima**.

Hasil pengujian pengaruh tidak langsung pada hipotesis keenam, kompetensi aparatur memiliki efek yang tidak langsung terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui sistem pengendalian internal dengan nilai p-value= $0,007<0,05$  dengan nilai  $\beta=0,196$  sehingga mendukung H6 yang artinya kompetensi aparatur memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui sistem pengendalian internal dengan ini **Hipotesis keenam diterima**. Selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi memiliki efek yang tidak langsung terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui sistem pengendalian internal dengan nilai p-value= $0,015<0,05$  dengan nilai  $\beta=0,196$  sehingga mendukung H7 yang artinya pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui sistem pengendalian internal dengan ini **Hipotesis ketujuh diterima**.

Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa memiliki dampak positif namun tidak signifikan, hasil ini tidak selaras dengan penelitian terdahulu dari Purba et al., (2022), dimana hal ini memungkinkan terjadi dikarenakan mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan SMA/SLTA sehingga keterampilan dalam pengelolaan dana desa masih perlu diberikan lagi, seperti ketrampilan akuntansi dan pengelolaan manajemen. Selanjutnya terkait pengaruh pemanfaatan sistem informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa memiliki dampak positif dan signifikan, hasil ini sejalan dengan penelitian dari (Arfiansyah & Astuti, 2020). Penggunaan aplikasi Siskuedes menjadikan optimalisasi dalam akuntabilitas pengelolaan, sehingga perlu didukung dengan kompetensi aparatur yang memadai.

Hasil penelitian sistem pengendalian Internal memiliki dampak positif terhadap pengelolaan dana desa sesuai dengan penelitian (Prabawa et al., 2020), hal ini memungkinkan terjadi karena efektivitas dalam pengawasan dan pengendalian internal menjadikan tata kelola dalam akuntabilitas pengelolaan semakin baik. Selanjutnya penelitian Saputra (2021) selaras dengan hasil penelitian yang menyatakan kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Sistem pengendalian Internal. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki efek yang tidak langsung terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui sistem pengendalian internal sesuai dengan hasil penelitian terdahulu dari (Prabawa et al., 2020; Saputra, 2021) sehingga menjadikan penguat dari hasil tersebut.

## KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan dana desa dikatakan akuntabel ketika telah mengikuti proses pengelolaan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pelaporan keuangan dana desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan hal yang penting untuk

memastikan transparansi, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan desa. Sistem pengendalian internal (SPI) memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi sejauh mana tanggung jawab akuntabilitas dalam mengelola dana desa dapat diwujudkan. Sistem pengawasan yang baik akan memastikan bahwa pengelola dana desa bertanggung jawab dan akuntabel dalam penggunaan dana desa. Kompetensi Aparatur Desa dalam mengelola dana desa, kapabilitas perangkat desa menjadi elemen krusial untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan akuntabel. Dengan memiliki kemampuan yang memadai, aparat desa dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Pemanfaatan Teknologi Informasi, dalam akuntabilitas pemerintahan desa memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa merupakan aspek yang krusial dalam pembangunan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, akuntabilitas memegang peranan penting sebagai landasan untuk memastikan pengelolaan dana desa dilakukan dengan transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan. Dalam literatur terkait, konsep akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sering dikaitkan dengan transparansi dalam pelaporan, pertanggungjawaban, dan penggunaan dana yang sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Regulasi ini mewajibkan pemerintahan desa untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana melalui transparansi dalam pelaporan keuangan, pertanggungjawaban atas penggunaan dana, serta pengawasan yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa hasil positif dan signifikan merupakan hasil pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa, H5: Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Merdeka Malang yang telah memberikan motivasi kepada Tim Dosen kami untuk tetap menghasilkan karya.

#### REFERENSI

- Ananda, C. F. (2021). Membangun Desa melalui Dana Desa.
- Arfiansyah, A., & Astuti, M. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82. Retrieved from <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Aucoin, P., & Heintzman, R. (2000). The Dialectics of Accountability for Performance in Public Management Reform. *International Review of Administrative Sciences*, 66, 45–55.
- Avellyni, A., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(10), 1–15.
- Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati, A. (2020). Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(4), 425–444. Retrieved from <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIRA Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4).
- Ismail, I., & Fakhris Lutfianto Hapsoro. (2023). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Perspektif Ajaran Bung Karno Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Singa Podium (JPMSIPO)*, 1(2), 40–47. Retrieved from <https://doi.org/10.58965/jpmsipo.v1i2.9>



- Ismail, M., Kuncara Widagdo, A., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–339.
- Juniarti, U., & Inapty, B. A. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening. *RISMA: Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 608–620.
- Latif, A., Mustanir, A., & Irwan, I. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan. *Jakpp (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*. Retrieved from <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.7977>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *GOODWILL: JURNAL RISET AKUNTANSI DANA AUDITING*, 8(2), 106–115.
- Munidewi, I. A. B. (2017). Akuntabilitas dalam Perspektif Ajaran Karma Phala Sebagai Pedoman Untuk Membangun Karakter Auditor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 54. Retrieved from <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p07>
- Prabawa, S., Karamoy, H., & Mawikere, Li. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah Terhadap Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Minahasa). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 269–278.
- Purba, S., Saragih, R., & Tika Meisiska Br Sembiring. (2022). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 122–129. Retrieved from <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>
- Rusydi, M. K. (2020). *SISTEM Pengendalian Intern Keuangan Desa*. Retrieved from Surabaya:
- Saputra, N. C. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *CASH: Economic, Accounting Scientific Journal*, 4(1), 82–95.
- Septiansyah, B., & Kushartono, T. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Academia Praja*, 5(1), 106–117. Retrieved from <https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx>
- Soleh, A., Susanto, F., & Susanti, R. (2017). Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. *Ekombis Review*, 114–125.
- Sukmana, E., & Islamy, H. (2019). Peranan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 4(2), 95–109.
- Sumarto, S. W. (2023). *Laporan Penelitian Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Retrieved from Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>
- Thoyib, M., Satria, C., Septiana, & Amri, D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekonomica Sharia*, 5(2), 13–30. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/esha.v5i2.122>